



Growing The Future
DEPARTEMEN AGRIBISNIS, FEM-IPB



Pangan Rakyat : SOAL HIDUP ATAU MATI 60 Tahun Kemudian

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Editor :
Anna Pariyanti
Amzul Rifin
Siti Jabroh
Bayu Krisnamurthi

Bogor Agricultural University

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



PANGAN RAKYAT : SOAL HIDUP ATAU MATI 60 TAHUN KEMUDIAN

Tim Penulis

Tim Editor :

Anna Fariyanti

Amzul Rifin

Fitri Jahroh

Bayu Krisnamurthi

Copyright© 2012 Departemen Agribisnis, FEM-IPB dan PERHEPI

Desain Cover : Hamid Jamaludin Muhrim
Dede Mulia Yusuf
Foto Cover : Google & Petrus Suryadi
Layout : Dede Mulia Yusuf
Penerbit : Departemen Agribisnis, FEM - IPB
dan PERHEPI
Terbitan Pertama : April 2012
Dicetak Oleh : Safa Printing, Jakarta
Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KTD)

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

ISBN : 978-979-19423-6-2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



DAFTAR ISI

SOAL HIDUP ATAU MATI	1
Sukarno	
SEBUAH PIDATO YANG VISIONER.....	19
Sjamsoe' oed Sadjad	
PANGAN RAKYAT SOAL HIDUP DAN MATI : REFLEKSI POLITIK PANGAN BANGSA	39
Rudi Wibowo	
REVOLUSI PANGAN DIMULAI DARI REVOLUSI CARA BERFIKIR TENTANG PANGAN	51
Darsono	
MEMBUKTIKAN KEBIJAKAN PANGAN NASIONAL	73
Bustanul Arifin	
PANGAN UNTUK RAKYAT : MELAWAN KETERCERABUTAN DAN IRASIONALITAS.....	91
Darmawan Salman	
GURUMISASI DAN SYARAF PSIKO-SOSIAL TRANSFORMASI INDONESIA.....	103
Agus Pakpahan	
PERAN KEWIRAUSAHAAN MENJAWAB TANTANGAN HIDUP ATAU MATI.....	111
Feryanto dan Burhanuddin	
INOVASI SEBAGAI PENGELAK "TODONGAN PISTOL" MASALAH PANGAN.....	125
Sudi Mardianto	
MANAJEMEN LANSKAP PEKARANGAN BAGI KETAHANAN PANGAN KELUARGA.....	147
Hadi Susilo Arifin	
PANGAN IKANI, PANGAN RAKYAT NEGARA KEPULAUAN.....	173
Indra Jaya	
KELAPA SAWIT PENYEDIA PANGAN DAN PENYOKONG KEHIDUPAN BANGSA	185
Erliza Hambali dan Mira Rivai	

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



PANGAN DAN ENERGI DALAM PERSPEKTIF GLOBAL DAN PEMBANGUNAN PANGAN LOKAL	201
Rahim Darma	
PERTANIAN PADI INDONESIA (MASALAH DAN SOLUSINYA).....	219
Zulfahrizal	
KETAHANAN PAKAN UNTUK MENUNJANG KETAHANAN PANGAN	239
Irma Badarina	
DIVERSIFIKASI PANGAN : STRATEGI KETAHANAN PANGAN DALAM UPAYA MEMENUHI KEBUTUHAN PANGAN RAKYAT	253
Tien R. Muchtadi dan Yuli Sukmawati	
OPTIMALISASI DIVERSIFIKASI PANGAN GUNA MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN NASIONAL YANG BERKELANJUTAN	273
Budi I. Setiawan	
DIVERSIFIKASI PANGAN DALAM PEMENUHAN GIZI DAN KESEHATAN: HAK ASASI BAGI KELANGSUNGAN HIDUP MANUSIA.....	289
Clara Meliyanti Kusharto	
DIVERSIFIKASI PANGAN; MUDAH TAPI SULIT.....	311
Netti Tinaprilla	
AKSELERASI DIVERSIFIKASI PANGAN SALAH SATU UPAYA DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN	327
Valeriana Darwis	
DUKUNGAN KEBIJAKAN FISKAL DALAM PENGUATAN KETAHANAN PANGAN INDONESIA	343
Anny Ratnawati	
INVESTASI PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN NASIONAL	367
Yusman Syaikat	
MEMBANGUN KEDAULATAN NEGARA MELALUI KEDAULATAN PANGAN	385
Fuad Hasan	
EFEKTIFITAS KENAIKAN HPP BERAS DAN PROYEKSINYA TERHADAP KEBIJAKAN IMPOR BERAS TAHUN 2012	395
Cicin Yulianti	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Bogor Agricultural University

60 TAHUN PENDIRIAN KAMPUS IPB BARANANGSIANG





MENJAWAB AMANAT BUNG KARNO 27 APRIL 1952 DI BARANANGSIANG BOGOR DALAM PEMENUHAN KEBUTUHAN PANGAN NASIONAL.....	407
S. Pratiwi, N. Emilia, dan R. Martha	
ALTERNATIF KEBIJAKAN SUBSIDI PADI YANG KOMPREHENSIF	427
A. Faroby Falatehan	
ARAH BARU PENURUNAN KETAHANAN PANGAN: "DERURALIZATION", "DEPEASANTIZATION", "DEAGRARIANIZATION"	449
Endriatmo Soetarto dan Ivanovich Agusta	
PERAN STRATEGIS KELEMBAGAAN PETANI DALAM MENENTUKAN KEBERHASILAN REFORMASI AGRARIA DALAM UPAYA MENJAMIN AKSES PANGAN DAN KESEJAHTERAAN PETANI MISKIN	461
Manuntun Parulian Hutagaol	
SUMBER DAYA MANUSIA UNTUK PANGAN : TANTANGAN DAN ANTISIPASI.....	477
Arif Satria	
JADIKAN IPB KAMPUS BIODIVERSITAS SEBAGAI TEMPAT PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN ANAK BANGSA YANG BHIHNEKA TUNGGAL IKA MENJADI CERDAS, BERAKHLAK DAN BERKARAKTER UNTUK AKTIF DALAM SOAL "HIDUP ATAU MATI" BANGSA	481
Ervizal A.M. Zuhud	
UPAYA Mendukung KETAHANAN PANGAN BERKELANJUTAN MELALUI REVITALISASI PROGRAM PRIMA TANI MENJADI MODEL PENGEMBANGAN PERTANIAN PERDESAAN MELALUI INOVASI (MP3MI) BERBASIS ICT	499
Gunawan dan Sugiyanto	
FAKTOR-FAKTOR PENENTU KETAHANAN PANGAN RUMAH TANGGA	515
Nurlatifah, Sri Mulatsih, dan Lukytawati Anggraeni	
KRISIS DAN JAMINAN PANGAN BAGI RAKYAT.....	531
Sucipto	
PANGAN = SOAL HIDUP ATAU MATI.....	545
Rafnel Azhari	

60 TAHUN PENDIRIAN KAMPUS IPB BARANANGSIANG



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



PANGAN VS BIOENERGI	549
Vela Rostwentivaivi Sinaga	
SOLUSI KRISIS PANGAN : UPAYA MENGGERAKKAN SEKTOR PERTANIAN MELALUI GERAKAN PEMUDA CINTA PERTANIAN	559
Resti Yanuar Akhir, Aghnia An'umillah, dan Annisa Sophia	
PROGRAM PERCEPATAN KETAHANAN PANGAN (PPKP): SOLUSI STRATEGIS DALAM MEMBANGUN PERTANIAN INDONESIA	577
Ahmad Sopian, Hadiyansyah Anwar dan Nadilla Ambar Fauziah	
PENERAPAN MANAJEMEN KOPERASI PETERNAK SUSU (KPS) EFEKTIF: SOLUSI DALAM MENANGANI PERMASALAHAN HARGA JUAL SUSU MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN SAPI PERAH	597
Vitalia Putri Asheri, Niken Larasati Abimanyu, dan Jannatin Alfafa	

Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



INVESTASI PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN NASIONAL

YUSMAN SYAUKAT

Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen
Institut Pertanian Bogor

PENDAHULUAN

Pada 6 Presiden Soekarno pada peletakan batu pertama pembangunan Gedung Fakultas Pertanian - Universitas Indonesia tanggal 27 April 1952 menunjukkan kesadaran nasional Bangsa Indonesia saat itu bahwa pemenuhan kebutuhan pangan merupakan perkara strategis suatu bangsa, bahkan dikemukakan sebagai "persoalan hidup dan mati". Kesadaran tersebut timbul akibat seringnya kejadian kekurangan pangan dan kelaparan yang menimpa masyarakat Indonesia sejak era penjajahan, perjuangan kemerdekaan, bahkan setelah kemerdekaan. Pada era modern pun, pemenuhan kebutuhan pangan tetap penting. Salah satu faktor penyebab keruntuhan Uni Sovyet, eks negara adidaya di era 80-an, misalnya, adalah karena ketidakmampuan negeri tersebut dalam memenuhi kebutuhan pangan bagi seluruh penduduknya. Dengan demikian, selain persoalan hidup dan mati, perkara pangan dapat pula dipandang sebagai "penentu keberadaan (eksistensi) suatu bangsa".

Permintaan bahan pangan sebagai kebutuhan dasar manusia terus mengalami peningkatan sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk dan perbaikan tingkat kesejahteraan mereka. Dengan jumlah penduduk 237 juta jiwa dan tingkat pertumbuhan penduduk 1,34 persen per tahun, kebutuhan pangan Indonesia pun terus mengalami peningkatan. Produksi pangan Indonesia sebenarnya juga mengalami perkembangan, namun hal tersebut kalah cepat dibandingkan dengan kedua faktor pertumbuhan tersebut. Bahkan, saat ini, perkembangan produktivitas tanaman pangan (tanaman padi, palawija dan hortikultura), peternakan

367



dan perikanan Indonesia relatif mengalami *leveling off* (pelandaian), sehingga produksi produk pangan tidak meningkat secara meyakinkan. Akibatnya, impor produk-produk pertanian Indonesia terus mengalami peningkatan, baik dalam hal jumlah maupun jenisnya.

Upaya peningkatan produksi pangan Indonesia terkendala oleh berbagai faktor, baik teknis, sosial, ekonomi, maupun kebijakan. Kendala utama mencakup, antara lain, terbatasnya dan rusaknya infrastruktur pertanian, kurangnya inovasi dan teknologi tepat guna di tingkat petani, rendahnya akses petani terhadap lembaga keuangan, inefisiensi dalam sistem distribusi dan pemasaran, rendahnya investasi di sektor pertanian, serta berbagai faktor lainnya. Kebijakan dan program pemerintah juga telah banyak dilakukan dalam pencapaian tujuan peningkatan produksi pangan namun, terkadang, kebijakan tersebut kurang tersinkronisasi, sehingga kurang memiliki daya-ungkit dalam meningkatkan produksi pangan di dalam negeri.

Investasi di sektor pertanian sangat dibutuhkan tidak hanya dalam peningkatan produksi dan produktivitas pangan, tetapi juga dalam rangka meningkatkan daya saing sektor pertanian, meyakinkan pencapaian ketahanan pangan (*food security*), meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, meningkatkan peran dan kontribusi pertanian terhadap pendapatan nasional, serta mendukung industrialisasi sektor pertanian dan perdesaan guna menampung tenaga kerja dari sektor pertanian.

Tulisan ini bertujuan untuk membahas secara spesifik peran investasi di sektor pertanian terhadap pencapaian ketahanan pangan di Indonesia. *Outline* penyampaian paper adalah sebagai berikut: (1) definisi dan dimensi ketahanan pangan, (2) strategi pencapaian ketahanan pangan, dan (3) peran investasi di sektor pertanian dalam pencapaian ketahanan pangan di Indonesia.

Definisi dan Dimensi Ketahanan Pangan

Food and Agricultural Organization (1996) di dalam *World Food Summit 1996* mengungkapkan bahwa "*food security exists when all people, at all times, have physical and economic access to sufficient, safe, and nutritious*



food to meet their dietary needs and food preferences for an active and healthy life". Berdasarkan definisi FAO tersebut, ada tiga dimensi utama dari *food security*: (a) *Availability* (ketersediaan): ketersediaan cukup pangan dengan kualitas yang memadai, yang berasal dari produksi domestik ataupun impor; (b) *Accessibility* (akses): akses rumah tangga dan individual terhadap pangan yang layak dan bergizi (*nutritious*); dan (c) *Affordability* (kemampuan): kemampuan individual dalam konsumsi pangan menurut kondisi sosial ekonomi, budaya, dan preferensi.

Undang-Undang RI No 7 tahun 1996 tentang Pangan, mengemukakan bahwa Ketahanan Pangan adalah: "kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau". Dari kedua definisi tersebut, ketahanan pangan menurut FAO lebih ditujukan kepada individual, sementara berdasarkan UU RI No 7/1996 ketahanan pangan lebih diarahkan kepada keluarga (rumah tangga).

Pemenuhan Pangan: Swasembada dan Ketahanan Pangan

Upaya pemenuhan kebutuhan pangan nasional dapat ditempuh melalui dua metode utama, yakni: swasembada pangan dan pengadaan pangan dari luar negeri. Konsep swasembada pangan (*food self-sufficiency*) sering diartikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan pangan dengan cara memproduksi di dalam negeri. Konsep swasembada pangan dipandang sebagai salah satu cara efektif dalam mencapai ketahanan pangan (*food security*) suatu negara, sehingga negara tersebut memiliki kontrol yang besar terhadap pasokan pangannya dan tidak tergantung pada pasar internasional, apalagi untuk produk-produk yang dipandang sangat strategis seperti beras di Indonesia. Program swasembada beras pernah dilakukan Indonesia pada era Presiden Soeharto dan mencapai puncaknya tahun 1984 ketika Indonesia berhasil mencapai swasembada beras dan Presiden Soeharto mendapatkan penghargaan dari FAO.

Ada dua perbedaan mendasar antara swasembada pangan dan ketahanan pangan, yaitu (FAO, 1997): (a) Swasembada pangan melihat hanya produksi nasional sebagai satu-satunya sumber pasokan pangan



(*food supply*), sementara ketahanan pangan mempertimbangkan juga aspek impor atau bantuan pangan sebagai sumber pasokan pangan; dan (b) Swasembada pangan mengartikan ketersediaan pangan (*food availability*) hanya pada pangan yang diproduksi di dalam negeri, sementara ketahanan pangan mencakup juga elemen stabilitas pasokan (*supply stability*) dan akses masyarakat terhadap pangan. Dengan demikian, swasembada pangan lebih menekankan pada pembangunan yang bertumpu pada kebutuhan untuk berdiri sendiri (*the need for self reliance*), sementara ketahanan pangan menekankan pada pembangunan yang memperhatikan spesialisasi internasional (*international specialization*) dan keuntungan komparatif (*comparative advantage*). Perdebatan mengenai kedua hal ini sudah sering terjadi. Namun, dari aspek praktis, kedua pilihan tersebut tergantung kepada kondisi yang dihadapi oleh masing-masing negara. Bagi Singapura, misalnya, tidak akan ada anjuran (rekomendasi) untuk menjalankan kebijakan *food self-sufficiency*; sementara bagi Indonesia peningkatan produksi pangan dalam negeri (khususnya beras) telah terbukti mampu mengurangi *food insecurity* di dalam negeri dan mengurangi ketergantungan terhadap impor beras. Dengan demikian, swasembada pangan merupakan salah satu komponen penting dari ketahanan pangan suatu negara.

Pemenuhan kebutuhan pangan nasional melalui perdagangan internasional (impor) merupakan implementasi dari *Ricardian trade theory* dan prinsip-prinsip *comparative advantage*. Menurut teori ini, adanya perbedaan produktivitas dan biaya imbalan (*opportunity costs*) antar negara dalam menghasilkan suatu produk merupakan landasan utama untuk dilakukannya perdagangan antar negara yang saling menguntungkan. Dalam kaitannya dengan perdagangan pangan, apa yang telah terjadi dengan adanya *agricultural liberalization* dan *flooding of imports cheap-food* di negara-negara sedang berkembang (*Least Developed Countries* atau LDCs)? Kwa (*undated*) mengungkapkan dampak dari perdagangan bebas tersebut sebagai berikut:

- a) *Cheap import food* telah menghancurkan basis produksi pertanian di negara-negara berkembang, karena para petani di LDCs tidak mampu berkompetisi dengan bahan pangan impor yang bersubsidi. Disamping itu, meskipun bahan pangan tersedia,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

370

Bogor Agricultural University

YUSMAN SYAUKAT
PANGAN BAKYAT: SOAL HIDUP! ATAU MATI 60 Tahun Kemudian



- tidak semua LDCs memiliki dana untuk membeli produk pangan tersebut.
- b) Konsekuensinya, LDCs terpaksa berhutang untuk membayar impor pangannya tersebut. Kondisi ini menimbulkan masalah *balance of payment* di LDCs
 - c) Petani-petani yang “terlempar” dari sektor pertanian (akibat tidak mampu bersaing dengan pangan impor bersubsidi) umumnya sulit mendapatkan pekerjaan baru. Dengan demikian, impor pangan dapat diartikan pula sebagai *importation of unemployment*.

Argumen bahwa impor bahan pangan murah akan memerlukan biaya rendah untuk memperolehnya merupakan alasan yang benar dalam jangka pendek. Namun, dalam jangka panjang, ia berpotensi menimbulkan ketiga potensi masalah di atas. Juga, pada akhirnya menjadikan negara pengimpor tersebut dalam posisi *vulnerable*, yang hanya memiliki sedikit otonomi dan kontrol. Hal seperti ini masih sering terjadi untuk komoditas pangan impor Indonesia, baik beras (sebelum swasembada) maupun non-beras (kedelai, jagung, gula, daging sapi, dan gandum).

Pencapaian Ketahanan Pangan Melalui Swasembada Pangan Nasional

Pemerintah Indonesia telah menyatakan bahwa ketahanan pangan nasional mensyaratkan adanya kemandirian, dimana kebutuhan pangan diutamakan bersumber dari produksi dalam negeri, yakni swasembada pangan (*food self-sufficiency*). Nainggolan (2007) mengemukakan bahwa sasaran ketahanan pangan dan swasembada adalah berbeda. Sasaran ketahanan pangan adalah pada manusia atau rumahtangga, yakni bagaimana manusia (rumah tangga) mampu mengkonsumsi pangan dengan gizi seimbang, sehingga dapat mencapai status gizi baik; sedangkan sasaran swasembada pangan adalah pada komoditas, yakni bagaimana produksi suatu komoditas pangan dapat memenuhi kebutuhan domestik, sehingga tidak diperlukan impor pangan.

Dengan demikian, ketahanan pangan Indonesia dimasa datang seyogyanya dicapai melalui pengembangan produksi pangan dalam negeri (*swasembada*), khususnya untuk komoditas-komoditas strategis yang selama ini sebagian besar masih diimpor, mencakup beras,



jagung, kedelai, gula dan daging sapi. Dengan peningkatan produksi pangan di dalam negeri ini, maka masalah *food trap* juga dapat diatasi. Untuk komoditas beras, target yang hendak dicapai adalah untuk mempertahankan bahkan meningkatkan produksi beras secara berkelanjutan (*sustainable rice self-sufficiency*). Target swasembada (pada periode pertama pemerintahan Presiden SBY) untuk komoditas jagung adalah tahun 2008, sementara kedelai tahun 2015, gula tahun 2009, dan daging sapi tahun 2010. Namun, hingga tahun 2010 target-target swasembada jagung, gula dan daging sapi tersebut belum tercapai; sehingga pada periode kedua pemerintahan Presiden SBY target-target swasembada tersebut direvisi menjadi tahun 2014 untuk semua komoditas. Dengan perkembangan penduduk Indonesia sebesar 1,34 persen per tahun selama periode 2000-2006 (BPS, 2007), maka untuk mencapai *food security* bagi seluruh masyarakat Indonesia diperlukan tercapainya laju pertumbuhan produksi komoditas-komoditas tersebut paling tidak sebesar 2,0 persen per tahun secara berkelanjutan.

Pentingnya Investasi di Sektor Pertanian

Investasi di sektor pertanian saat ini mulai menjadi incaran para investor di negara-negara maju akibat tingginya harga produk pertanian, khususnya pangan, sehingga memberikan keuntungan yang relatif besar. "*Agricultural investments are as good as green gold*". Ada lima alasan utama mengapa investasi di sektor pertanian menjadi sangat penting¹:

- a) Cadangan pangan (sereal) dunia terus mengalami penurunan; akibatnya harga pangan terus mengalami peningkatan. Menghadapi hal ini, negara produsen sereal terbesar pun, seperti Argentina, menurunkan laju ekspornya dan mengalihkannya menjadi cadangan pangan domestik.
- b) Kebutuhan pangan terus meningkat, sehingga menimbulkan tekanan besar terhadap peningkatan produksi pangan dunia. Konsumsi daging juga mengalami peningkatan sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk kelas menengah.
- c) Peningkatan produksi dan permintaan minyak nabati (*biofuels*) terutama di negara-negara maju, sehingga meningkatkan permintaan lahan-lahan pertanian.

1 Chris Meyer. "Invest in Agriculture: Five Reasons to Start Today". <http://dailyreckoning.com/invest-in-agriculture/>



- d) Penurunan rata-rata area lahan pertanian per kapita; sementara pencetakan lahan pertanian baru relatif terbatas. Oleh karena itu, beberapa negara telah mengembangkan area lahan pertanian mereka ke negara-negara berkembang di Afrika dan Asia. Kondisi ini telah menimbulkan masalah baru, dikenal dengan istilah *Land Grabbing* (penyerobotan lahan), karena produksi pangan di negara-negara miskin tersebut sebenarnya hanya untuk kepentingan (ketahanan pangan) negara investor.
- e) Semakin langkanya sumberdaya air bagi aktivitas produksi pertanian, sehingga upaya peningkatan produksi pangan semakin sulit.

Di negara berkembang, investasi di sektor pertanian masih relatif rendah. Adanya peningkatan harga produk pangan tidak memberikan peningkatan kesejahteraan bagi para pelaku usahatani, tetapi justru meningkatkan kompleksitas masalah kemiskinan dan kekurangan pangan, karena sebagian besar petani merupakan *net consumers* bahan pangan yang dihasilkannya.

Investasi di Indonesia secara umum mengalami perkembangan pesat pasca krisis finansial 1997/98 seiring dengan membaiknya kebijakan pemerintah dan iklim usaha di dalam negeri. Investasi (penanaman modal dalam negeri dan asing - PMDN dan PMA), dalam bentuk *gross fixed capital formation* (GFCF)², mengalami peningkatan secara pesat, sehingga mencapai 32 persen dari GDP (*gross domestic product*) Indonesia pada tahun 2010 (OECD, 2012). *Foreign Direct Investment* (FDI) merupakan komponen penting dari GFCF, dimana Indonesia merupakan salah satu negara atraktif bagi tujuan investasi ini. Selama periode 2005-2010 rata-rata FDI Indonesia mencapai USD 9,5 milyar per tahun (bandingkan dengan Cina yang mencapai USD 107,5 milyar per tahun).

Akan tetapi, investasi - PMDN dan PMA - yang masuk ke Indonesia sebagian besar masuk ke pasar modal dan bukan ke sektor riil, sehingga kurang memberi manfaat bagi masyarakat banyak. Investasi yang masuk ke sektor pertanian masih sangat rendah, kurang dari 5 persen

2 GFCF yaitu pengadaan, pemanfaatan dan pembelian barang modal baru dari dalam negeri, serta barang modal baru atau lama dari luar negeri. GFCF terdiri atas pembentukan kapital dalam bentuk: konstruksi, peralatan dan mesin, peralatan transportasi, serta barang modal lainnya (BPS, 2011).



dari total investasi (dan sebagian besar dialokasikan di sub-sektor perkebunan). Padahal, kontribusi sektor pertanian terhadap GDP lebih dari 15 persen dan menyerap sekitar 40 persen angkatan kerja. Meskipun secara kuantitas masih rendah, namun investasi di sektor pertanian tersebut ternyata lebih produktif dibandingkan dengan investasi di sektor lainnya. Rata-rata ICOR (*incremental capital - output ratio*) sektor pertanian selama periode 2006-2010 mencapai 0,04, sedangkan sektor manufaktur 0,30 dan sektor jasa 0,16 (OECD, 2012). Hal ini menggambarkan bahwa investasi di sektor pertanian lebih efektif dalam meningkatkan output. Rendahnya ICOR sektor pertanian mengindikasikan rendahnya akumulasi kapital di sektor ini akibat rendahnya investasi, sehingga membuka peluang untuk berinvestasi di sektor pertanian.

Investasi di Sektor Pertanian dan Upaya Penguatan Ketahanan Pangan

Dengan penduduk terbesar di dunia (1,2 milyar jiwa) dan lahan pertanian hanya 9 persen, Cina telah melakukan investasi besar-besaran di sektor pertanian dengan memperbaiki teknologi dan mengaplikasikan berbagai inovasi baru pertanian, serta memperbarui sistem usahatani dan infrastruktur pertanian, dalam rangka meningkatkan produksi pangan dalam jangka panjang. Dengan cara tersebut, Cina mampu meningkatkan produktivitas lahan, efisiensi penggunaan input dan produktivitas tenaga kerja. Saat ini Cina telah mampu swasembada gandum, dan pada tahun 2020, konsumsi gandum Cina diperkirakan mencapai 572,5 juta ton. Namun, Cina masih mengimpor komoditas jagung, kedelai dan beras, karena tingginya laju permintaan pangan dibandingkan laju peningkatan produksinya³.

Meskipun jumlah penduduk dan perkembangan ekonomi Indonesia masih lebih rendah dibandingkan Cina, investasi di sektor pertanian di Indonesia sangat diperlukan. Hal ini terjadi mengingat masih tingginya impor komoditas pangan utama, seperti jagung, kedelai, gula, daging

3 Michael Martina and Tracy Zheng. "China to Invest in Agriculture Innovation to Boost Food Security". <http://www.reuters.com/article/2012/02/01/us-china-agriculture>. (February 1, 2012).

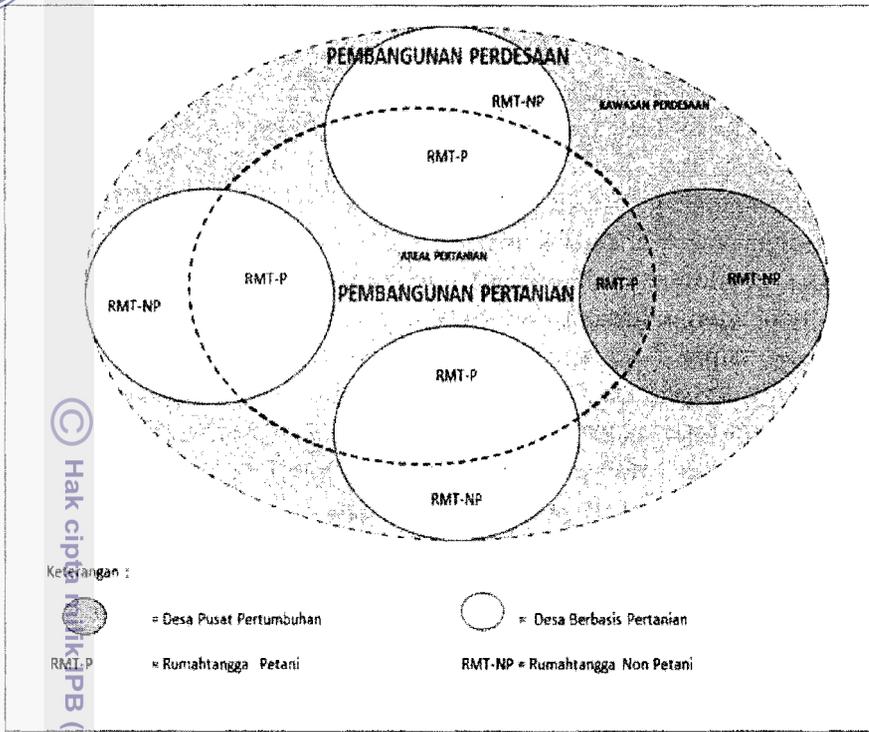


sapi, gandum, serta komoditas lainnya, seperti sayur dan buah-buahan. Tanpa investasi yang memadai di sektor pertanian, mustahil ketahanan pangan dapat direalisasikan. Ketahanan pangan sangat erat terkait dengan ketersediaan pangan, disamping aspek distribusinya. Untuk komoditas beras, Indonesia sudah mampu berswasembada beras, walaupun sejak tahun 2007 masih mengimpor sekitar 4 persentotal kebutuhan beras. Hal ini merupakan suatu prestasi besar, karena selama ini Indonesia dikenal sebagai negara importir beras terbesar di dunia. Padahal, jumlah (volume) beras beras yang diperdagangkan di pasar dunia tidaklah terlalu besar (dikenal dengan istilah *thin market*), yakni sekitar 20-an juta ton saja. Berbeda dengan komoditas beras, untuk komoditas jagung, gula, daging sapi, kedelai dan gandum, ketergantungan Indonesia terhadap luar negeri masih sangat besar, bervariasi antara 8,1 persen (jagung) hingga 100 persen (gandum).

Investasi di sektor pertanian harus dikaitkan dengan pembangunan perdesaan secara terintegrasi (*integrated agricultural and rural development* atau pembangunan pertanian dan perdesaan terpadu - P3T). P3T memiliki makna bahwa pengembangan pertanian perlu dirancang sebagai suatu sistem terpadu dan disinergikan dengan pembangunan perdesaan. Dengan pendekatan ini, pembangunan pertanian tidak terbatas hanya pada pengembangan aktivitas *on-farm* (kegiatan usahatani), tetapi juga melibatkan aktivitas *off-farm* (baik industri pertanian hulu maupun hilir), pelayanan jasa penunjang, serta memperhatikan keterkaitannya dengan kegiatan non-farm (aktivitas non-pertanian) yang berkembang di perdesaan (Gambar 1). Dengan pendekatan ini, diharapkan investasi yang dialokasikan akan menjadi lebih efektif dan efisien, karena tidak sekedar meningkatkan produksi pangan (pertanian), tetapi juga meningkatkan nilai tambah dari produk pertanian dan perdesaan yang dihasilkan, sehingga akan lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan masalah kemiskinan di perdesaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



GAMBAR 1. Pembangunan Pertanian dan Perdesaan Terpadu

Investasi di sektor pertanian dan perdesaan yang mendukung program ketahanan pangan dapat dibedakan menjadi tiga kelompok: (a) pengembangan pertanian rakyat, (b) pembangunan pertanian skala besar, serta (c) pengembangan kemitraan antara pertanian skala besar dan skala kecil.

a) Pembangunan Pertanian Rakyat

Mengingat jumlah petani kecil sangat dominan, dengan rata-rata penguasaan lahan pertanian rata-rata 0,3 ha per petani, dan tingkat kemiskinan perdesaan yang tinggi (17 persen), maka kemiskinan dan kekurangan (ketahanan) pangan seringkali menjadi masalah kronis di perdesaan. Untuk menangani hal ini, maka investasi yang ditujukan untuk meningkatkan intensitas dan produktivitas pertanian harus diprioritaskan. Investasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan ini antara lain melalui penyediaan dan pengaplikasian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



teknologi produksi komoditas pangan dengan potensi hasil yang tinggi (*high yield varieties*), serta pembangunan dan/atau perbaikan infrastruktur pertanian - seperti irigasi dan lahan pertanian serta jalan perdesaan - khususnya di wilayah-wilayah telah diusahakan atau daerah yang berpotensi untuk diusahakan secara intensif, baik di Jawa maupun di Luar Jawa. Pengembangan infrastruktur pertanian di daerah perlu dikembangkan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung pengembangan pertanian, juga sesuai dengan kondisi dan daya-dukung lingkungan (agroekosistem) setempat. Pengembangan infrastruktur non-pertanian juga perlu dikembangkan dan dikaitkan dengan upaya pengembangan pertanian setempat.

Investasi di bidang *hardware* seperti di atas merupakan *necessary condition* (syarat mutlak) dalam upaya peningkatan/pengembangan usahatani skala kecil. Namun, hal tersebut harus diimbangi dengan penguatan kondisi penunjangnya (*sufficient condition*) yang dapat mendukung petani dalam memanfaatkan fasilitas tersebut secara lebih optimal. Hal ini antara lain menyangkut penyediaan tenaga penyuluhan pertanian, pengadaan sarana produksi pertanian, bahkan penyediaan permodalan pertanian untuk memfasilitasi kegiatan produksi pertanian.

Kondisi di atas mengingatkan kita pada Program Bimas yang telah dilaksanakan di Indonesia tahun 1970-an. Secara umum dapat dikatakan bahwa dalam membangun pertanian rakyat pemerintah perlu mengembangkan "Program Bimas Gaya Baru", disesuaikan dengan kondisi-kondisi agroekosistem, sosial dan ekonomi masyarakat pada wilayah tertentu pada saat sekarang.

Pada wilayah-wilayah tertentu, pengembangan *integrated farming system* (sistem usahatani terintegrasi) perlu dikembangkan. Sistem usahatani terpadu dapat mengambil berbagai bentuk usaha, seperti integrasi usaha tanaman pangan-ternak (seperti padi - sapi), tanaman pangan - ternak - ikan (padi - sapi - ikan), kebun - ternak (kelapa sawit - sapi), ternak - ikan (ayam - ikan), dan variasi lainnya. Keterkaitan antara komponen usaha di dalam suatu sistem usahatani terpadu (sebagai contoh: padi - sapi) dapat disampaikan pada Gambar 2. Dari Gambar 2 tampak bahwa kotoran/limbah yang dihasilkan sapi dan padi akan didaur ulang menjadi pupuk organik dan pakan ternak yang

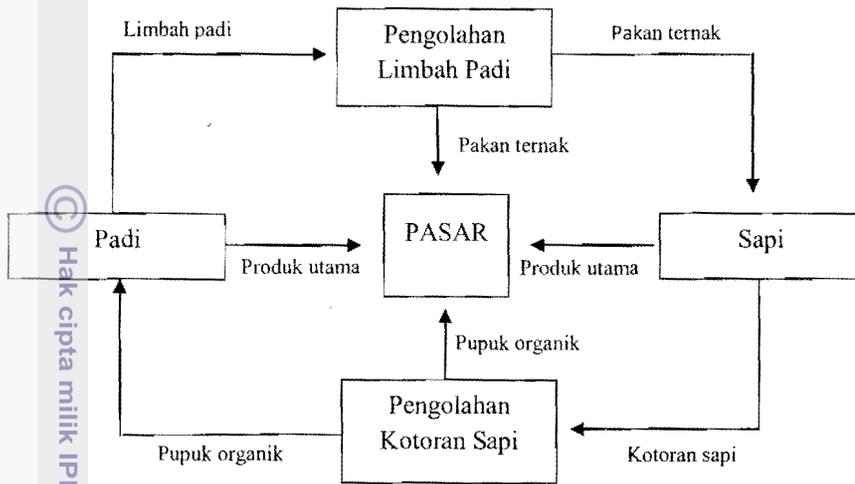
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

memiliki nilai ekonomi dan sistem usahatani ini mampu mengurangi limbah (*zero wastes*), sehingga lebih ramah lingkungan. Kelebihan pakan ternak dan pupuk organik yang dihasilkan, setelah dikurangi untuk penggunaan oleh petani itu sendiri, dapat pula dijual ke pasar sehingga akan meningkatkan pendapatan petani.



GAMBAR 2. Pengembangan Sistem Usahatani Terpadu

Sistem usahatani terpadu dapat meningkatkan efisiensi investasi dibandingkan dengan investasi pada pengembangan usahatani secara individual. Hal ini terjadi karena sistem usahatani terintegrasi dapat meningkatkan produktivitas, meningkatkan pendapatan, sistem perputaran limbah yang lebih baik, adopsi teknologi baru, meningkatkan efisiensi penggunaan input, menciptakan lapangan kerja, memperbaiki kesuburan lahan, menciptakan lingkungan yang bebas polusi, mengatasi krisis energi, mengatasi krisis bahan bakar dan kayu bakar, meningkatkan perputaran uang sepanjang tahun, menghasilkan bahan pangan yang seimbang - sehingga mampu meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, serta meningkatkan standar hidup masyarakat - khususnya masyarakat tani.

b) Pembangunan Pertanian Skala Besar

Pengembangan pertanian skala besar dimungkinkan untuk memanfaatkan keuntungan untuk melakukan usaha pertanian secara

terkonsentrasi. Kegiatan pembangunan pertanian yang terkonsentrasi ini pada dasarnya dilakukan untuk dapat memanfaatkan *economics of scale* dalam berproduksi, sehingga lebih efisien secara ekonomi. Saat ini pembangunan pertanian skala besar sudah banyak diusahakan di sub-sektor perkebunan, seperti kelapa sawit, kelapa, kakao, karet, dan lainnya; namun tidak berarti bahwa di luar sub-sektor perkebunan tidak bisa dilaksanakan.

Pengembangan *food estate* merupakan salah satu program yang dapat dilakukan dalam pengembangan produksi pangan dan diharapkan dapat meningkatkan ketahanan pangan nasional. *Food Estate* (FE) merupakan konsep pengembangan produksi pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, bahkan peternakan yang berada di suatu kawasan lahan yang sangat luas (*an integrated farming, plantation and livestock zone*). Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah bahkan telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 10/2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman, sebagai payung hukum berinvestasi di FE di Indonesia. Tujuan pembangunan FE adalah untuk mencapai ketahanan pangan nasional dan jika berlebih bisa dilakukan ekspor. Potensi untuk berinvestasi di program ini masih terbuka luas, terutama di luar Jawa, dengan memanfaatkan lahan-lahan sub-optimal, seperti lahan-lahan kritis. Untuk pertama kali, FE dikembangkan di Merauke, Papua, dengan nama: *Merauke Integrated Food and Energy Estate* (*MIFEE*) program.

Program FE memiliki potensi manfaat yang besar, namun masih dihadapkan pada berbagai permasalahan: dari ketersediaan lahan, teknik pengelolaan lahan, permodalan, masalah lingkungan, hingga masalah sosial ekonomi. Artinya, program tersebut harus direncanakan dengan baik agar memenuhi kriteria kelayakan proyek (*project feasibility*), dilihat dari aspek teknis, ekonomi, sosial dan lingkungan (Syaukat, 2010).

Pengusaha besar yang mana yang diperkenankan masuk mengelola FE? Ini juga merupakan salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan, karena beberapa faktor: pertama, jika peluang berinvestasi di FE dibuka untuk perusahaan asing, dikhawatirkan Indonesia akan semakin terbelenggu oleh kapital asing dan meliberalisasi semuanya yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



justru akan mengancam kedaulatan pangan. Kedua, jika pemerintah tidak mampu mengontrol distribusi produksi hasil dari FE, maka para pemodal akan menjadi penentu harga pasar - karena keputusan untuk dijual di dalam negeri atau diekspor adalah harga yang menguntungkan bagi pemodal. Ketiga, apabila peraturan yang mengatur FE lebih berpihak kepada pemodal daripada petani, maka kemungkinan konflik seperti konflik di perkebunan besar akan terjadi juga di FE. Keempat, jika perusahaan asing diperkenankan untuk membuka FE dalam skala luas, dikhawatirkan akan terjadi masalah *land grabbing* sebagaimana yang telah terjadi di negara-negara lain. FAO melalui laporan bertajuk "*Lands Grab or Development Opportunity?: Agriculture Investment and International Land Deals in Africa*" mengungkapkan: "sebuah negara berinvestasi di lahan pertanian negara lain ditujukan untuk mengamankan pasokan pangan dalam negerinya sendiri". Konsekuensinya: (a) menempatkan negara-negara miskin pada posisi rentan dalam menghadapi ancaman krisis pangan, dan (b) selain petani akan terusir dari lahannya, dampak kerusakan ekologi karena pola *intensive farming* bakal sangat merugikan (Syaukat, 2010).

c) **Pembangunan Kemitraan dalam Peningkatan Ketahanan Pangan**

Mengingat sebagian besar masyarakat petani masih terkendala dengan ketidakberdayaan lainnya, maka diperlukan adanya suatu kebijakan yang pro terhadap mereka. Untuk mengatasi ini, pola ketiga dapat dipertimbangkan, yakni dengan melakukan pengembangan program kemitraan yang sinergis (saling menguatkan dan menguntungkan) antara pengusaha besar dengan petani kecil. Program kemitraan ini dapat dilaksanakan baik di sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, maupun perikanan.

Kemitraan, sesuai dengan UU Nomor 9 tahun 1995, diartikan sebagai suatu kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah atau besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Pola kemitraan ini bisa bermanfaat dalam meningkatkan akses usaha kecil (baca: petani) ke pasar, modal dan

YUSMAN SYAUKAT
PANGAN RAKYAT: SOAL HIDUP ATAU MATI 60 Tahun Kemudian

380



teknologi, serta mencegah terjadinya *diseconomies of scale*, sehingga mutu juga terjaga.

Pemerintah, pada masa lalu, pernah mengembangkan Pola Kemitraan Inti-Plasma antara petani (kelompok tani) sebagai plasma dengan perusahaan inti yang bermitra. Dalam hal ini, perusahaan inti menyediakan lahan, sarana produksi, bimbingan teknis dan manajemen, serta menampung, mengolah dan memasarkan produksi. Pola ini memiliki kelebihan disamping kekurangannya. Dengan mempelajari kembali kasus-kasus yang terjadi pada masa lalu, diharapkan pola-pola kemitraan yang memberikan penghidupan terhadap petani kecil ini dapat dikembangkan kembali.

Perusahaan Inti dalam hal ini dapat berupa perusahaan swasta maupun perusahaan BUMN. Apalagi saat ini pemerintah tengah mengembangkan BUMN Pangan. Pengembangan ketahanan pangan nasional akan lebih efektif apabila BUMN Pangan dapat mengembangkan pola-pola kerjasama kemitraan dengan petani setempat atau tempatan dalam pengembangan bisnis pangan skala luas, sehingga dapat membantu mereka dalam mengembangkan bisnis pangannya. Untuk menjaga agar petani dapat hidup berkecukupan (sejahtera), maka lahan yang digarap petani harus cukup luas, misalnya 2 hektar.

Dengan status perusahaan BUMN, tentunya perusahaan inti akan lebih mudah dalam mendapatkan lahan yang diperlukan (dengan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah), juga aspek permodalan yang dibutuhkan. Ketika daerah tujuan pengembangan memiliki tenaga kerja yang relatif terbatas, program ini dapat pula dikaitkan dengan kegiatan transmigrasi, sebagaimana yang telah dikembangkan sebelumnya.

Penutup

Ketahanan pangan nasional dapat dicapai secara efisien dan efektif jika didasarkan pada produksi pangan di dalam negeri, walaupun tidak harus swasembada penuh untuk setiap komoditas pangan. Produksi pangan domestik harus terus dikembangkan untuk mensubstitusi produk pangan impor. Untuk meningkatkan produksi pangan domestik, tidak hanya memerlukan pengembangan aspek *hardware* (teknologi



dan infrastruktur), tetapi juga harus diperkuat dengan pengembangan *software*-nya, seperti penyuluhan pertanian, akses perbankan, dan lainnya.

Ketahanan pangan nasional tersebut dapat dilakukan dengan mengembangkan sistem pembangunan pertanian dan perdesaan terpadu, dimana pengembangan pertanian dirancang sebagai suatu sistem terpadu dan disinergikan dengan pembangunan perdesaan. Dengan pendekatan ini, diharapkan investasi yang dialokasikan akan menjadi lebih efektif dan efisien, karena tidak sekedar meningkatkan produksi pangan (ketahanan pangan), tetapi juga meningkatkan nilai tambah dari produk pertanian dan perdesaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta penanggulangan masalah kemiskinan di perdesaan.

Pola pola investasi yang dilaksanakan harus dapat mengakomodasikan tujuan pertumbuhan ekonomi makro dan tujuan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan petani kecil. Untuk mencapai hal ini, maka sistem pembangunan pertanian dan perdesaan terpadu dilakukan secara berkelanjutan, berkeadilan dan berkedaulatan melalui pengembangan sistem kemitraan antara perusahaan besar dan petani kecil dalam peningkatan produksi pangan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS. 2007. Statistik Indonesia 2007. Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- FAO. 1996. Rome Declaration on World Food Security and World Food Summit Plan of Action. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Rome.
- FAO. 1997. Implications of Economic Policy for Food Security : A Training Manual. <http://www.fao.org/docrep/004/x3936e/X3936E03.htm> (diakses 10 April 2010)
- Kwa, Aileen. undated. WTO Food Politics: Food Security through Liberalised Trade or the Nurturing of Domestic Production?

382

YUSMAN SYAUKAT
PANGAN RAKYAT: SOAL HIDUP ATAU MATI 60 Tahun Kemudian



- Nainggolan, Kaman. 2007. Kebijakan dan Strategi Ketahanan Pangan untuk Pembangunan Daerah. Bahan Kuliah di Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah dan Manajemen Ketahanan Pangan IPB, 25 Agustus 2007.
- OECD. 2012. OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) Agricultural Policy Reviews: Indonesia (draft - February 1, 2012)
- Suryana, Achmad. 2008. Sustainable Food Security Development in Indonesia: Policies and Its Implementation. Paper presented at High-level Regional Policy Dialogue Organized by UN-ESCAP and Government of Indonesia Bali, 9-10 December 2008
- Syauckat, Yusman. 2010. Kebijakan Pengembangan Food Estate di Merauke. Paper dipresentasikan pada Seminar Nasional Food Estate di Indonesia: Mampukah Mewujudkan Pembangunan Pertanian yang Berkelanjutan, Berkeadilan dan Berkeadilan? Kementerian Pertanian dan FEMA IPB, Bogor, 14 Desember 2010.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

YUSMAN SYAUKAT
PANGAN RAKYAT: SOAL HIDUP ATAU MATI 50 Tahun Kemudian

383

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.